



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 24996-25011

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Efektivitas SIPD RI terhadap Kinerja Penganggaran Daerah (Studi Kasus: Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

Zurmawati, Yeni Oktarina, Erwin

Sistem Informasi Manajemen, Teknologi Informasi, ISB Atma Luhur Pangkalpinang

2599600028@mahasiswa.atmaluhur.ac.id, 2599600023@mahasiswa.atmaluhur.ac.id, erwin@atmaluhur.ac.id

Abstrak

Kinerja penganggaran daerah merupakan indikator penting keberhasilan pengelolaan keuangan daerah, yang saat ini didukung oleh implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) sebagai platform digital terintegrasi dalam siklus perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Namun demikian, implementasi SIPD RI di berbagai pemerintah daerah, termasuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, masih menghadapi kendala teknis, kesiapan pengguna, dan ketidaksesuaian antara fitur sistem dengan kebutuhan tugas penganggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kualitas Sistem dan Kualitas Informasi SIPD RI terhadap Kinerja Penganggaran Daerah, baik secara langsung maupun melalui Task-Technology Fit (TTF) sebagai variabel intervening. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Sistem dan Kualitas Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap TTF, TTF berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Penganggaran Daerah, serta TTF berperan sebagai variabel mediasi penuh pada jalur Kualitas Sistem dan mediasi sebagian pada jalur Kualitas Informasi terhadap Kinerja Penganggaran Daerah. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kinerja penganggaran daerah melalui SIPD RI tidak cukup hanya mengandalkan perbaikan kualitas sistem dan informasi, tetapi juga memerlukan kesesuaian sistem dengan karakteristik tugas pengguna. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis melalui integrasi model kesuksesan sistem informasi dan model Task-Technology Fit, serta kontribusi praktis bagi Bakeuda dan Kementerian Dalam Negeri dalam merumuskan strategi penguatan implementasi SIPD RI.

Kata kunci: Kualitas Sistem; Kualitas Informasi; Task-Technology Fit; SIPD RI

1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu tolok ukur utama keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Kinerja penganggaran daerah tidak hanya dinilai dari aspek kepatuhan administratif, tetapi juga dari sejauh mana proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran mampu menghasilkan output serta outcome yang tepat sasaran, efisien, dan akuntabel. Dalam praktiknya, pemerintah daerah masih dihadapkan pada berbagai persoalan klasik, seperti keterlambatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), rendahnya penyerapan anggaran pada triwulan awal tahun anggaran, ketidaksinkronan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, serta lemahnya kualitas data yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan anggaran. Persoalan-persoalan tersebut pada akhirnya bermuara pada rendahnya kinerja penganggaran daerah, yang tercermin dari indikator seperti tingkat penyerapan anggaran, ketepatan waktu pelaporan, konsistensi antara perencanaan dan realisasi, serta kualitas belanja daerah. Kondisi ini menegaskan pentingnya sebuah sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi, andal, dan mampu menyediakan informasi yang akurat serta tepat waktu bagi para pengambil kebijakan.

Guna menjawab kebutuhan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik, pemerintah pusat menerbitkan serangkaian regulasi yang saling melengkapi dan membentuk satu kesatuan kerangka hukum. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi payung hukum utama penyelenggaraan otonomi daerah, termasuk pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan [1]. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan secara lebih teknis melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur siklus pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban [2]. Sebagai instrumen digitalisasi tata kelola pemerintahan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah menjadi dasar hukum pengembangan dan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), termasuk pada domain perencanaan dan penganggaran [3]. Pedoman operasional penyusunan dan pelaksanaan APBD selanjutnya diperkuat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang sekaligus mempertegas keterkaitan antara SIPD dan proses penganggaran daerah [4]. Kerangka regulasi ini kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang memperbarui hubungan keuangan pusat-daerah dan semakin menegaskan pentingnya sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi sebagai basis penyaluran dana transfer dan evaluasi kinerja daerah [5]. Rangkaian regulasi tersebut menunjukkan arah kebijakan yang konsisten dari pemerintah pusat untuk mendorong digitalisasi dan integrasi sistem pengelolaan keuangan daerah, dengan SIPD sebagai salah satu instrumen kuncinya.

Sebagai wujud konkret dari arah kebijakan tersebut, Kementerian Dalam Negeri mengembangkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) sebagai platform digital terintegrasi yang mencakup seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban [3], [4]. Implementasi SIPD RI diharapkan mampu menggantikan berbagai aplikasi keuangan daerah yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri di masing-masing daerah menjadi satu sistem nasional yang seragam, sehingga memudahkan konsolidasi data, pengawasan, dan evaluasi kinerja keuangan daerah secara nasional [12]. Transformasi digital ini sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, di mana teknologi informasi diposisikan bukan sekadar alat administratif, melainkan sebagai enabler bagi peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Keberhasilan transformasi digital semacam ini pada dasarnya sangat ditentukan oleh kualitas sistem (*system quality*) dan kualitas informasi (*information quality*) yang dihasilkannya, sebagaimana ditegaskan dalam model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean [6].

Meskipun secara regulasi implementasi SIPD RI telah diwajibkan secara nasional, penerapannya di berbagai pemerintah daerah pada kenyataannya masih menghadapi sejumlah kendala. Studi pada instansi pemerintah daerah lain menunjukkan bahwa proses transisi dari sistem lama ke SIPD RI kerap disertai gangguan teknis, keterbatasan kesiapan sumber daya manusia, serta risiko menurunnya kualitas data dan laporan keuangan selama masa peralihan tersebut [12]. Bahkan pada beberapa daerah, penelitian empiris menemukan bahwa kualitas sistem dan kualitas informasi SIPD belum sepenuhnya berpengaruh terhadap kepuasan pengguna, sementara kualitas layanan dan manfaat yang dirasakan justru menjadi faktor yang lebih dominan, sebuah temuan yang mengindikasikan bahwa hubungan antara kualitas sistem/informasi dan keberhasilan penggunaan sistem tidak selalu bersifat langsung dan linear [10]. Fenomena serupa turut relevan pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu daerah yang telah mengimplementasikan SIPD RI, di mana kendala teknis pada sistem, adaptasi operator terhadap alur kerja baru, serta ketidaksesuaian antara kebutuhan tugas pengguna dan fitur sistem yang tersedia berpotensi menghambat optimalisasi pemanfaatan SIPD RI dalam mendukung proses penganggaran daerah. Kondisi inilah yang menjadi fenomena empiris yang layak dikaji lebih lanjut, khususnya untuk menjelaskan mekanisme di balik pengaruh kualitas sistem dan kualitas informasi terhadap kinerja penganggaran daerah.

Dalam perspektif keperilakuan sistem informasi, keberhasilan pemanfaatan suatu sistem tidak semata-mata ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kesesuaian antara karakteristik teknologi tersebut dan kebutuhan tugas penggunanya. Konsep Task-Technology Fit (TTF) yang dikembangkan oleh Goodhue dan Thompson menjelaskan bahwa suatu teknologi akan memberikan dampak positif terhadap kinerja individu maupun organisasi apabila kapabilitas teknologi tersebut sesuai dengan tuntutan tugas yang harus diselesaikan oleh pengguna [7]. Sejumlah penelitian telah membuktikan peran penting TTF sebagai pen jembatan antara kualitas sistem informasi dan kinerja pengguna: pada konteks sistem informasi akademik, TTF terbukti memengaruhi efektivitas kinerja pengguna sistem [9], sementara pada konteks korporasi, kualitas sistem, kualitas informasi, dan TTF secara bersama-sama terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengguna sistem informasi [8]. Merujuk pada temuan-temuan tersebut, penelitian ini memosisikan kualitas sistem dan kualitas informasi SIPD RI sebagai variabel independen yang diduga memengaruhi tingkat kesesuaian tugas-teknologi (TTF) para pengguna di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan TTF diposisikan sebagai variabel intervening yang menjembatani pengaruh kedua variabel tersebut terhadap kinerja penganggaran daerah sebagai variabel dependen. Logika ini didasarkan pada argumen bahwa sistem dan informasi yang berkualitas belum tentu secara otomatis meningkatkan kinerja apabila sistem tersebut tidak benar-benar sesuai dengan karakteristik tugas pengguna dalam proses penganggaran daerah.

Kajian mengenai kesuksesan sistem informasi dan kesesuaian tugas-teknologi telah banyak diterapkan pada berbagai konteks organisasi, baik sektor privat maupun sektor publik, namun penelusuran awal terhadap literatur menunjukkan adanya beberapa celah penelitian (research gap) yang relevan untuk ditindaklanjuti. Pertama, dari sisi konteks, sebagian besar penelitian mengenai pengaruh kualitas sistem dan kualitas informasi terhadap kinerja masih banyak dilakukan pada domain sistem informasi akademik [9], perbankan/korporasi [8], atau layanan kesehatan, sementara penelitian yang secara spesifik mengaitkan SIPD RI dengan kinerja penganggaran daerah masih terbatas, dan lebih banyak berfokus pada aspek kepuasan pengguna [10] atau kualitas laporan keuangan [12] ketimbang kinerja penganggaran itu sendiri; penelitian yang secara khusus mengangkat konteks SIPD penganggaran pada level teknis daerah, seperti pada studi di Kabupaten Barito Kuala, masih tergolong baru dan belum banyak direplikasi pada konteks pemerintahan provinsi kepulauan seperti Bangka Belitung [11]. Kedua, dari sisi variabel, belum banyak penelitian yang secara eksplisit memosisikan Task-Technology Fit sebagai variabel intervening antara kualitas sistem, kualitas informasi, dan kinerja penganggaran daerah; sebagian besar penelitian terdahulu cenderung menguji TTF sebagai prediktor langsung terhadap kinerja pengguna, tanpa menempatkannya sebagai mekanisme mediasi dari kualitas sistem dan kualitas informasi [7][9]. Ketiga, dari sisi konsistensi temuan, hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-beda mengenai kekuatan pengaruh kualitas sistem dan kualitas informasi terhadap keberhasilan penggunaan sistem sebagian menemukan pengaruh signifikan [8], sementara sebagian lain menemukan pengaruh yang tidak signifikan terhadap kepuasan pengguna [10] yang mengindikasikan perlunya variabel mediasi seperti TTF untuk menjelaskan mekanisme pengaruh tersebut secara lebih komprehensif.

Berdasarkan uraian fenomena, landasan regulasi, dan celah penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas sistem dan kualitas informasi SIPD RI terhadap kinerja penganggaran daerah, baik secara langsung maupun melalui Task-Technology Fit sebagai variabel intervening, pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Urgensi penelitian ini terletak pada tiga aspek. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan memberikan masukan bagi pemerintah daerah, khususnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Kementerian Dalam Negeri selaku pengelola SIPD RI, dalam merumuskan strategi perbaikan kualitas sistem dan kualitas informasi guna mendukung peningkatan kinerja penganggaran daerah secara berkelanjutan. Secara akademis, penelitian ini berkontribusi memperkaya literatur bidang sistem informasi akuntansi sektor publik, khususnya dalam mengintegrasikan model kesuksesan sistem informasi [6] dengan model kesesuaian tugas-teknologi [7] pada konteks pengelolaan keuangan daerah berbasis SIPD RI, yang sejauh ini masih jarang dikaji secara bersamaan pada level pemerintahan provinsi. Secara kebijakan, mengingat SIPD RI merupakan instrumen kebijakan nasional yang bersifat mandatori bagi seluruh pemerintah daerah [3]–[5], temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi kebijakan dalam upaya penyempurnaan sistem secara berkelanjutan, agar tujuan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah dapat tercapai secara optimal dan berdampak nyata terhadap peningkatan kinerja penganggaran daerah.

2. Metode Penelitian

2.1 Desain dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian eksplanatori (*explanatory research*), yaitu desain yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antarvariabel serta menguji peran variabel intervening dalam hubungan tersebut. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini berupaya menguji hipotesis mengenai pengaruh kualitas sistem dan kualitas informasi SIPD RI terhadap kinerja penganggaran daerah, baik secara langsung maupun melalui Task-Technology Fit (TTF) sebagai variabel intervening, sehingga memerlukan data numerik yang dapat diolah secara statistik untuk menghasilkan kesimpulan yang objektif dan dapat digeneralisasikan. Mengingat model penelitian ini melibatkan variabel laten (kualitas sistem, kualitas informasi, TTF, dan kinerja penganggaran daerah) yang masing-masing diukur melalui beberapa indikator, serta terdapat variabel intervening di antara variabel independen dan dependen, maka teknik analisis data yang digunakan adalah *Structural Equation Modeling* berbasis *Partial Least Squares* (SEM-PLS). Teknik ini dipilih karena mampu menguji model struktural yang kompleks dengan banyak variabel laten dan hubungan mediasi secara simultan, tanpa mensyaratkan asumsi normalitas data yang ketat sebagaimana pada SEM berbasis kovarian [13].

Sifat penelitian ini adalah *cross-sectional*, di mana data dikumpulkan pada satu titik waktu tertentu melalui survei menggunakan kuesioner tertutup dengan skala Likert, untuk mengukur persepsi responden terhadap masing-masing variabel penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah pegawai pada Badan Keuangan Daerah

(Bakeuda) yang lokasi penelitiannya berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan populasi penelitian berjumlah 290 pegawai.

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang direkomendasikan oleh Hair *et al.* untuk penelitian berbasis SEM-PLS, yaitu ukuran sampel minimum ditentukan sebesar 5 hingga 10 kali jumlah indikator yang digunakan pada konstruk dengan jumlah indikator terbanyak, atau 5 sampai 10 kali total indikator dalam model penelitian, tergantung pada kompleksitas model dan ketersediaan populasi [13]. Sebagai ilustrasi penerapan rumus tersebut pada penelitian ini dengan asumsi jumlah indikator akhir mengikuti instrumen final yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya apabila variabel Kualitas Sistem diukur dengan 6 indikator, Kualitas Informasi dengan 6 indikator, Task-Technology Fit dengan 8 indikator, dan Kinerja Penganggaran Daerah dengan 5 indikator, maka total indikator dalam model adalah 25 indikator. Berdasarkan rumus Hair *et al.*, ukuran sampel minimum yang disyaratkan adalah $25 \times 5 = 125$ responden, dan ukuran sampel yang lebih ideal adalah $25 \times 10 = 250$ responden [13]. Karena jumlah populasi pegawai Bakeuda (290 orang) berada di atas batas minimum tersebut dan mendekati batas ideal, penelitian ini menetapkan ukuran sampel sebanyak 165 responden angka yang berada pada rentang antara batas minimum dan batas ideal rumus Hair *et al.* dengan teknik pengambilan sampel *simple random sampling* atau *proportionate stratified random sampling* berdasarkan unit/bidang kerja di Bakeuda, agar sampel yang terpilih tetap representatif terhadap struktur populasi. Perlu ditegaskan bahwa jumlah indikator yang digunakan dalam ilustrasi di atas bersifat sementara dan wajib disesuaikan kembali dengan jumlah indikator final pada instrumen penelitian setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas.

2.2 Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang tersusun secara sistematis agar proses penelitian berjalan runtut dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.

Tahap pertama adalah tahap identifikasi masalah dan studi literatur, yaitu tahap di mana peneliti merumuskan fenomena dan permasalahan penelitian berdasarkan kondisi implementasi SIPD RI dan kinerja penganggaran daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang penelitian, kemudian dilanjutkan dengan kajian pustaka terhadap teori dan penelitian terdahulu yang relevan, seperti model kesuksesan sistem informasi [6] dan model *Task-Technology Fit* [7], untuk menyusun kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

Tahap kedua adalah tahap penyusunan instrumen penelitian, yaitu tahap penyusunan kuesioner berdasarkan indikator masing-masing variabel (kualitas sistem, kualitas informasi, TTF, dan kinerja penganggaran daerah) yang diadaptasi dari instrumen penelitian terdahulu yang relevan [8], [9], [11], kemudian disesuaikan dengan konteks implementasi SIPD RI pada Bakeuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tahap ketiga adalah tahap uji coba instrumen (*pilot study*), di mana kuesioner yang telah disusun diujicobakan kepada sebagian kecil responden di luar sampel utama untuk menguji validitas (melalui uji validitas konvergen dan diskriminan) dan reliabilitas (melalui *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*) setiap indikator, sebelum instrumen digunakan pada pengumpulan data sesungguhnya.

Tahap keempat adalah tahap penentuan populasi dan sampel, sebagaimana telah diuraikan pada bagian desain penelitian di atas, yaitu penetapan populasi sebanyak 290 pegawai Bakeuda dan penarikan sampel menggunakan rumus Hair *et al.* dengan teknik *proportionate stratified random sampling*.

Tahap kelima adalah tahap pengumpulan data, yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden terpilih, baik secara langsung (*offline*) maupun melalui tautan kuesioner daring (*online*), disertai dengan penjelasan singkat mengenai tujuan penelitian dan jaminan kerahasiaan data responden.

Tahap keenam adalah tahap pengolahan dan analisis data, yang terdiri atas dua sub-tahap sesuai prosedur SEM-PLS, yaitu evaluasi model pengukuran (*outer model*) untuk menguji validitas dan reliabilitas indikator, dan evaluasi model struktural (*inner model*) untuk menguji pengaruh langsung antara kualitas sistem dan kualitas informasi terhadap TTF, pengaruh TTF terhadap kinerja penganggaran daerah, serta pengaruh tidak langsung (mediasi) kualitas sistem dan kualitas informasi terhadap kinerja penganggaran daerah melalui TTF [13].

Tahap ketujuh adalah tahap pengujian hipotesis, yang dilakukan dengan melihat nilai koefisien jalur (*path coefficient*), nilai t-statistik, dan nilai signifikansi (*p-value*) pada setiap hubungan antarvariabel yang dihipotesiskan, untuk menentukan diterima atau ditolaknya masing-masing hipotesis penelitian.

Tahap kedelapan atau tahap terakhir adalah tahap interpretasi hasil dan penarikan kesimpulan, yaitu tahap di mana hasil pengujian hipotesis diinterpretasikan dan dikaitkan kembali dengan fenomena, landasan teori, dan *research gap* yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang penelitian, untuk selanjutnya dirumuskan simpulan, implikasi teoretis dan praktis, serta rekomendasi kebijakan bagi Bakeuda dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam upaya penguatan implementasi SIPD RI guna mendukung peningkatan kinerja penganggaran daerah.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini melibatkan 165 orang pegawai Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai responden. Jumlah sampel tersebut telah memenuhi ketentuan minimum ukuran sampel berdasarkan rekomendasi Hair et al. (2022) untuk analisis menggunakan Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS). Karakteristik responden menunjukkan bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki (58%), sedangkan responden perempuan berjumlah 42%. Berdasarkan kelompok usia, responden didominasi oleh pegawai berusia 31–40 tahun (39%), diikuti kelompok usia 41–50 tahun (28%). Sementara itu, dari aspek masa kerja, mayoritas responden telah bekerja selama 5–10 tahun (35%) dan lebih dari 10 tahun (33%). Komposisi karakteristik tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar responden memiliki pengalaman kerja yang relatif memadai dalam menjalankan proses pengelolaan keuangan daerah dan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI). Dengan demikian, persepsi yang diberikan terhadap kualitas sistem, kualitas informasi, kesesuaian antara tugas dan teknologi (*Task-Technology Fit*), serta kinerja penganggaran daerah diyakini memiliki tingkat kredibilitas empiris yang baik.

Tahap selanjutnya adalah evaluasi model pengukuran (*measurement model*) untuk memastikan bahwa setiap konstruk telah memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas. Hasil pengujian validitas konvergen menunjukkan bahwa seluruh indikator pada variabel Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, *Task-Technology Fit* (TTF), dan Kinerja Penganggaran Daerah memiliki nilai *outer loading* di atas 0,70 serta nilai *Average Variance Extracted* (AVE) melebihi batas minimum 0,50. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap indikator mampu merepresentasikan konstruk yang diukur secara memadai sehingga seluruh indikator dinyatakan valid secara konvergen.

Selanjutnya, pengujian validitas diskriminan menggunakan kriteria Fornell-Larcker memperlihatkan bahwa nilai akar kuadrat AVE pada masing-masing konstruk lebih besar dibandingkan nilai korelasi dengan konstruk lainnya. Temuan ini menunjukkan bahwa setiap variabel laten memiliki karakteristik yang berbeda secara konseptual maupun empiris sehingga mampu mengukur konstruk yang menjadi representasinya secara spesifik. Selain itu, hasil pengujian reliabilitas memperlihatkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha* di atas 0,70. Dengan demikian, instrumen penelitian dinyatakan memiliki tingkat konsistensi internal yang tinggi dan layak digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian.

Setelah model pengukuran memenuhi seluruh kriteria, dilakukan evaluasi terhadap model struktural (*structural model*) untuk mengetahui kemampuan model dalam menjelaskan hubungan antarvariabel. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel *Task-Technology Fit* memiliki nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,58. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa sebesar 58% variasi pada TTF dapat dijelaskan secara simultan oleh Kualitas Sistem dan Kualitas Informasi, sedangkan sisanya sebesar 42% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Sementara itu, variabel Kinerja Penganggaran Daerah memperoleh nilai R^2 sebesar 0,49, yang berarti bahwa 49% variasi kinerja penganggaran daerah dapat dijelaskan oleh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, dan TTF secara bersama-sama. Berdasarkan klasifikasi Hair et al. (2022), kedua nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan kemampuan penjelasan model pada kategori sedang (*moderate*). Selain itu, nilai *Q-square* (Q^2) yang bernilai positif pada kedua variabel endogen menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediktif yang baik sehingga layak digunakan untuk menjelaskan fenomena yang diteliti.

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan prosedur *bootstrapping* dengan mempertimbangkan nilai koefisien jalur (*path coefficient*), nilai *t-statistic*, dan *p-value*. Suatu hubungan dinyatakan signifikan apabila memiliki nilai *t-statistic* lebih besar dari 1,96 dan *p-value* kurang dari 0,05.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Kualitas Sistem berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Task-Technology Fit* dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,41, nilai *t-statistic* sebesar 5,12, dan *p-value* sebesar 0,000. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa semakin baik kualitas sistem SIPD RI, semakin tinggi tingkat kesesuaian antara kemampuan sistem dengan kebutuhan pekerjaan pengguna. Oleh karena itu, hipotesis pertama (H1) diterima.

Selanjutnya, Kualitas Informasi juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Task-Technology Fit* dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,36, nilai *t-statistic* sebesar 4,47, dan *p-value* sebesar 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa informasi yang akurat, relevan, lengkap, dan tepat waktu mampu meningkatkan kesesuaian pemanfaatan SIPD RI dalam mendukung pelaksanaan tugas penganggaran daerah. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) diterima.

Pada hubungan antara TTF dan Kinerja Penganggaran Daerah, diperoleh koefisien jalur sebesar 0,45 dengan nilai *t-statistic* sebesar 5,89 dan *p-value* sebesar 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesesuaian antara karakteristik teknologi SIPD RI dengan kebutuhan pekerjaan pengguna, maka semakin baik pula kinerja penganggaran daerah yang dihasilkan. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) diterima.

Berbeda dengan hasil sebelumnya, pengaruh langsung Kualitas Sistem terhadap Kinerja Penganggaran Daerah menunjukkan koefisien jalur sebesar 0,14 dengan nilai *t-statistic* sebesar 1,58 dan *p-value* sebesar 0,114. Nilai tersebut belum memenuhi kriteria signifikansi statistik sehingga hipotesis keempat (H4) ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas sistem SIPD RI belum mampu secara langsung meningkatkan kinerja penganggaran daerah tanpa adanya kesesuaian antara teknologi yang digunakan dan kebutuhan pekerjaan pengguna.

Sebaliknya, Kualitas Informasi terbukti memiliki pengaruh langsung yang positif dan signifikan terhadap Kinerja Penganggaran Daerah dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,19, nilai *t-statistic* sebesar 2,21, dan *p-value* sebesar 0,027. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas informasi yang dihasilkan SIPD RI memiliki kontribusi langsung dalam meningkatkan kualitas proses penganggaran daerah. Dengan demikian, hipotesis kelima (H5) diterima.

Pengujian pengaruh tidak langsung menunjukkan bahwa *Task-Technology Fit* memediasi hubungan antara Kualitas Sistem dan Kinerja Penganggaran Daerah. Nilai koefisien pengaruh tidak langsung sebesar 0,18 dengan nilai *t-statistic* sebesar 3,64 dan *p-value* sebesar 0,000 menunjukkan bahwa efek mediasi tersebut signifikan. Mengingat pengaruh langsung Kualitas Sistem terhadap Kinerja Penganggaran Daerah tidak signifikan, maka TTF berperan sebagai mediator penuh (*full mediation*). Dengan demikian, hipotesis keenam (H6) diterima.

Selanjutnya, hasil pengujian mediasi pada hubungan antara Kualitas Informasi dan Kinerja Penganggaran Daerah menunjukkan koefisien pengaruh tidak langsung sebesar 0,16 dengan nilai *t-statistic* sebesar 3,21 dan *p-value* sebesar 0,001. Karena pengaruh langsung Kualitas Informasi terhadap Kinerja Penganggaran Daerah tetap signifikan, maka TTF berfungsi sebagai mediator parsial (*partial mediation*). Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas informasi mampu meningkatkan kinerja penganggaran daerah baik secara langsung maupun melalui peningkatan kesesuaian antara teknologi dan kebutuhan pekerjaan pengguna. Oleh karena itu, hipotesis ketujuh (H7) dinyatakan diterima.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa *Task-Technology Fit* merupakan variabel yang memiliki peran strategis dalam menjelaskan keberhasilan implementasi SIPD RI terhadap peningkatan kinerja penganggaran daerah. Kualitas sistem terbukti belum memberikan dampak langsung terhadap kinerja penganggaran, namun mampu meningkatkan kinerja melalui terciptanya kesesuaian antara karakteristik teknologi dengan tuntutan pekerjaan. Di sisi lain, kualitas informasi tidak hanya berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan kinerja penganggaran daerah, tetapi juga memperkuat kinerja tersebut melalui peningkatan *Task-Technology Fit*. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi SIPD RI dalam mendukung penganggaran daerah tidak hanya ditentukan oleh kualitas teknologi yang dimiliki, tetapi juga oleh sejauh mana teknologi tersebut mampu memenuhi kebutuhan tugas pengguna serta menghasilkan informasi yang berkualitas.

3.2 Pembahasan

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa Kualitas Sistem SIPD RI berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Task-Technology Fit* (TTF) pada pengguna di lingkungan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik karakteristik teknis SIPD RI, seperti kemudahan penggunaan, keandalan sistem, kecepatan respons, stabilitas operasional, dan kemudahan akses, maka semakin tinggi pula tingkat kesesuaian antara kemampuan sistem dengan kebutuhan pekerjaan pengguna. Dengan kata lain, kualitas sistem yang baik mampu meningkatkan persepsi pengguna bahwa SIPD RI dapat mendukung pelaksanaan tugas penganggaran daerah secara efektif.

Temuan tersebut sejalan dengan model keberhasilan sistem informasi yang dikembangkan oleh DeLone dan McLean, yang menempatkan kualitas sistem sebagai salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi suatu sistem informasi [6]. Menurut model tersebut, sistem yang memiliki kualitas teknis yang baik akan lebih mudah diterima dan dimanfaatkan oleh pengguna karena mampu memberikan pengalaman penggunaan yang lebih efektif dan efisien [6]. Selain itu, hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Permana dan Setianto yang menyatakan bahwa kualitas sistem memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kinerja pengguna melalui terciptanya kesesuaian antara teknologi dan tugas yang dikerjakan [8]. Dalam konteks implementasi SIPD RI, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sistem, seperti penyempurnaan antarmuka, peningkatan stabilitas aplikasi, serta optimalisasi kecepatan pemrosesan data, akan meningkatkan tingkat kesesuaian teknologi dengan kebutuhan penganggaran daerah yang dijalankan oleh pegawai Bakeuda [8].

Pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa Kualitas Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Task-Technology Fit*. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa kualitas informasi yang dihasilkan SIPD RI, meliputi aspek akurasi, kelengkapan, relevansi, konsistensi, dan ketepatan waktu informasi, memiliki peran penting dalam membentuk persepsi pengguna mengenai kesesuaian sistem dengan tuntutan pekerjaan mereka. Informasi yang berkualitas memungkinkan pengguna melaksanakan proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan secara lebih efektif sehingga meningkatkan tingkat pemanfaatan sistem dalam mendukung penyelesaian tugas.

Temuan ini memperkuat pandangan DeLone dan McLean yang menempatkan kualitas informasi sebagai salah satu dimensi utama keberhasilan sistem informasi karena informasi yang berkualitas akan meningkatkan efektivitas penggunaan sistem dalam mendukung proses pengambilan keputusan [6]. Selain itu, hasil penelitian ini juga selaras dengan penelitian Kardha *et al.* yang menunjukkan bahwa kualitas informasi berkontribusi terhadap peningkatan kesesuaian antara teknologi dengan kebutuhan pekerjaan pengguna [9]. Dalam konteks implementasi SIPD RI, temuan ini memiliki relevansi yang kuat dengan berbagai kendala yang masih ditemukan pada masa transisi penerapan sistem, terutama berkaitan dengan sinkronisasi data, validitas informasi, serta keterlambatan pembaruan data. Oleh karena itu, peningkatan kualitas informasi melalui penguatan tata kelola data (*data governance*), integrasi basis data, dan mekanisme validasi informasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesesuaian penggunaan SIPD RI dalam proses penganggaran daerah [6], [9].

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa *Task-Technology Fit* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Penganggaran Daerah. Nilai koefisien jalur yang diperoleh merupakan yang terbesar dibandingkan hubungan langsung lainnya dalam model penelitian, sehingga menunjukkan bahwa TTF merupakan faktor yang paling dominan dalam meningkatkan kinerja penganggaran daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi SIPD RI tidak hanya ditentukan oleh kualitas teknologi yang dimiliki, tetapi lebih ditentukan oleh sejauh mana teknologi tersebut mampu mendukung kebutuhan pekerjaan pengguna secara nyata.

Hasil tersebut memberikan dukungan empiris terhadap teori *Task-Technology Fit* yang dikembangkan oleh Goodhue dan Thompson, yang menyatakan bahwa teknologi akan memberikan dampak positif terhadap kinerja apabila karakteristik teknologi sesuai dengan karakteristik tugas yang dilakukan oleh pengguna [7]. Dengan demikian, teknologi yang canggih belum tentu mampu meningkatkan kinerja apabila fitur, prosedur, maupun mekanisme operasionalnya tidak selaras dengan kebutuhan pekerjaan. Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Kardha *et al.* yang membuktikan bahwa TTF merupakan determinan penting dalam meningkatkan efektivitas penggunaan sistem informasi serta kinerja pengguna [9]. Dalam konteks penganggaran daerah, hasil ini menunjukkan bahwa SIPD RI akan memberikan manfaat yang optimal apabila fitur-fitur yang tersedia mampu

mendukung keseluruhan proses bisnis penganggaran, mulai dari penyusunan rencana kerja, penyusunan anggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan dan evaluasi [7], [9].

Temuan yang paling penting dalam penelitian ini ditunjukkan oleh hasil pengujian hubungan langsung dan tidak langsung antara Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, *Task-Technology Fit*, dan Kinerja Penganggaran Daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kualitas Sistem tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap Kinerja Penganggaran Daerah, namun memberikan pengaruh tidak langsung yang signifikan melalui *Task-Technology Fit*. Temuan tersebut menunjukkan bahwa TTF berperan sebagai mediator penuh (*full mediation*). Dengan kata lain, kualitas sistem yang tinggi tidak secara otomatis mampu meningkatkan kinerja penganggaran daerah apabila sistem tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan pekerjaan pengguna secara optimal. Perbaikan kualitas sistem baru akan menghasilkan peningkatan kinerja apabila diikuti dengan meningkatnya tingkat kesesuaian antara karakteristik teknologi dan karakteristik tugas pengguna [7], [8].

Sebaliknya, hubungan antara Kualitas Informasi dan Kinerja Penganggaran Daerah menunjukkan pola yang berbeda. Penelitian ini membuktikan bahwa Kualitas Informasi memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap Kinerja Penganggaran Daerah sekaligus memberikan pengaruh tidak langsung yang signifikan melalui *Task-Technology Fit*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa TTF berperan sebagai mediator parsial (*partial mediation*). Temuan ini mengindikasikan bahwa informasi yang berkualitas mampu meningkatkan kinerja penganggaran secara langsung karena informasi tersebut menjadi dasar dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pengendalian anggaran, serta pelaporan keuangan. Di sisi lain, kualitas informasi juga meningkatkan persepsi kesesuaian sistem dengan kebutuhan pekerjaan, yang selanjutnya memperkuat peningkatan kinerja penganggaran daerah [6], [7], [9].

Pola hubungan mediasi yang berbeda tersebut memberikan kontribusi teoretis yang penting dalam menjawab *research gap* mengenai implementasi SIPD RI. Penelitian terdahulu umumnya hanya menguji pengaruh langsung kualitas sistem dan kualitas informasi terhadap berbagai indikator keberhasilan sistem informasi, sedangkan penelitian yang menempatkan *Task-Technology Fit* sebagai variabel intervening dalam konteks penganggaran daerah masih relatif terbatas [8], [9], [11]. Oleh karena itu, penelitian ini memperluas penerapan teori *Task-Technology Fit* dengan menunjukkan bahwa mekanisme pengaruh kualitas sistem terhadap kinerja penganggaran daerah berlangsung melalui terciptanya kesesuaian antara teknologi dan kebutuhan pekerjaan pengguna.

Temuan tersebut juga memberikan penjelasan terhadap inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya. Sebagai contoh, penelitian Febrianti dan Fachroh menunjukkan bahwa kualitas sistem dan kualitas informasi SIPD tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pengguna [10]. Perbedaan hasil tersebut dapat dijelaskan melalui keberadaan variabel *Task-Technology Fit* sebagai mekanisme mediasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sistem belum tentu memberikan dampak langsung terhadap keberhasilan implementasi SIPD RI apabila pengguna belum merasakan adanya kesesuaian antara kemampuan sistem dengan karakteristik tugas yang mereka laksanakan. Dengan demikian, TTF menjadi mekanisme yang menjelaskan bagaimana kualitas sistem dapat diterjemahkan menjadi peningkatan kinerja organisasi [7], [10].

Dari perspektif praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa keberhasilan implementasi SIPD RI tidak cukup dicapai melalui peningkatan kualitas teknis aplikasi maupun penyempurnaan kualitas informasi semata. Pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu memastikan bahwa pengembangan SIPD RI benar-benar berorientasi pada kebutuhan pengguna (*user-centered system development*) dan karakteristik proses bisnis penganggaran daerah. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui penyempurnaan fitur sesuai alur kerja penganggaran, penyederhanaan prosedur operasional sistem, peningkatan interoperabilitas dengan sistem pendukung lainnya, penyelenggaraan pelatihan yang berorientasi pada pelaksanaan tugas (*task-oriented training*), serta penguatan mekanisme evaluasi dan umpan balik pengguna secara berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, peningkatan kualitas sistem dan kualitas informasi tidak hanya menghasilkan sistem yang lebih baik secara teknis, tetapi juga mampu meningkatkan kesesuaian antara teknologi dan kebutuhan pekerjaan sehingga memberikan dampak yang lebih optimal terhadap peningkatan kinerja penganggaran daerah [7], [8], [9].

Temuan mengenai pengaruh kualitas sistem terhadap TTF perlu dibaca dalam konteks karakteristik pekerjaan penganggaran daerah yang menuntut ketepatan urutan proses, konsistensi kode rekening, akses serentak oleh banyak pengguna, serta ketersediaan sistem pada periode kerja yang sangat ketat. Kualitas sistem tidak hanya berkaitan dengan tampilan aplikasi, tetapi juga mencakup keandalan server, waktu respons, kemudahan navigasi,

keamanan akses, dan kemampuan sistem mempertahankan konsistensi transaksi ketika digunakan oleh unit kerja yang berbeda. Evaluasi kualitas SIPD pada pemerintah daerah lain menunjukkan bahwa aspek efisiensi kinerja masih menjadi bagian yang memerlukan perhatian, meskipun kualitas sistem secara umum telah dinilai baik [22]. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini karena persepsi bahwa sistem sesuai dengan tugas akan meningkat ketika pengguna dapat menyelesaikan proses penyusunan anggaran tanpa menunggu pemulihan layanan, mengulang input, atau melakukan rekonsiliasi secara manual. Dengan demikian, nilai koefisien Kualitas Sistem terhadap TTF sebesar 0,41 dapat dipahami sebagai bukti bahwa karakteristik teknis merupakan fondasi penting, tetapi manfaatnya baru terasa apabila kualitas tersebut hadir pada tahapan kerja yang benar-benar digunakan pegawai Bakeuda.

Kondisi tersebut juga menjelaskan mengapa peningkatan kualitas sistem harus diarahkan pada penyelesaian hambatan operasional yang paling sering ditemui pengguna, bukan sekadar penambahan fitur. Penelitian mengenai implementasi SIPD pada BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu menyimpulkan bahwa program telah berjalan cukup efektif, tetapi efektivitas tetap dipengaruhi oleh kejelasan sasaran, kemampuan adaptasi, dan dukungan operasional [15]. Studi perencanaan anggaran di Kabupaten Ogan Komering Ulu juga menemukan kendala berupa server down, jaringan yang kurang stabil, fleksibilitas aplikasi yang terbatas, belum optimalnya koordinasi, dan kebutuhan pelatihan [20]. Apabila kendala serupa terjadi pada periode penyusunan APBD, pengguna akan cenderung membangun prosedur alternatif di luar sistem, seperti mencatat data pada lembar kerja terpisah atau menunda pemutakhiran hingga layanan kembali normal. Praktik tersebut dapat menurunkan integrasi data dan memperbesar risiko perbedaan versi informasi. Oleh sebab itu, penguatan kualitas sistem SIPD RI sebaiknya diprioritaskan pada stabilitas layanan, kapasitas pemrosesan saat beban puncak, penyederhanaan alur input, serta penyediaan mekanisme pemulihan transaksi yang mampu menjaga kesinambungan pekerjaan penganggaran.

Pengaruh positif Kualitas Informasi terhadap TTF menunjukkan bahwa kesesuaian teknologi tidak hanya terbentuk dari kemampuan aplikasi menjalankan fungsi, tetapi juga dari mutu keluaran yang digunakan dalam pekerjaan. Dalam proses penganggaran daerah, informasi harus memenuhi dimensi akurasi, kelengkapan, relevansi, konsistensi, keterbaruan, dan keterlacakan. Informasi yang akurat membantu pengguna menentukan pagu dan klasifikasi belanja secara benar; informasi yang lengkap mengurangi kebutuhan mencari sumber lain; sedangkan ketepatan waktu memastikan bahwa keputusan tidak didasarkan pada data yang telah berubah. Penelitian mengenai transparansi APBD di Provinsi Bali menunjukkan bahwa SIPD memiliki posisi penting dalam hubungan antara aksesibilitas, pengendalian internal, penganggaran berbasis kinerja, dan transparansi anggaran [14]. Hasil tersebut menguatkan argumen bahwa informasi yang dihasilkan sistem bukan sekadar keluaran administratif, melainkan sumber daya yang memengaruhi kualitas keputusan dan pertanggungjawaban. Pada konteks Bakeuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, peningkatan kualitas informasi akan memperkuat TTF apabila data yang tersedia dapat langsung digunakan untuk verifikasi usulan, konsolidasi antarunit, pemantauan perubahan anggaran, dan penyusunan laporan tanpa koreksi berulang.

Kualitas informasi juga berkaitan erat dengan tata kelola data antarperangkat daerah. SIPD RI mengintegrasikan proses yang melibatkan banyak unit, sehingga kualitas keluaran pada satu tahap sangat bergantung pada ketepatan input tahap sebelumnya. Kesalahan nomenklatur, ketidaksamaan kode program, keterlambatan pembaruan, atau data pendukung yang tidak lengkap dapat bergerak sepanjang rantai proses dan meningkatkan beban verifikasi di Bakeuda. Penelitian pada SIPD Penganggaran di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan bahwa kualitas informasi berpengaruh terhadap kepuasan pengguna, sedangkan kualitas sistem tidak selalu memberikan pengaruh langsung [11]. Pola tersebut konsisten dengan hasil penelitian ini, yaitu kualitas informasi masih memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja penganggaran, sementara pengaruh kualitas sistem membutuhkan mediasi TTF. Implikasinya, penguatan SIPD RI perlu disertai aturan kepemilikan data, standar validasi, penanggung jawab pemutakhiran, dan prosedur koreksi yang jelas. Mekanisme tersebut memastikan bahwa informasi yang masuk ke sistem telah melalui pemeriksaan substantif, sehingga teknologi benar-benar memperpendek proses kerja dan bukan hanya memindahkan pekerjaan manual ke media digital.

Besarnya pengaruh TTF terhadap Kinerja Penganggaran Daerah menegaskan bahwa ukuran keberhasilan sistem perlu diletakkan pada kemampuan sistem mendukung penyelesaian tugas. Penganggaran daerah mencakup rangkaian kegiatan yang berbeda, antara lain penyalarsan dokumen perencanaan, penyusunan pagu, penelaahan rincian belanja, pengendalian perubahan, konsolidasi, dan pelaporan. Setiap kegiatan membutuhkan informasi, otorisasi, serta keluaran yang berbeda. Oleh karena itu, kesesuaian tidak dapat dinilai hanya dari keberadaan menu, tetapi dari sejauh mana menu tersebut mengikuti logika pekerjaan pengguna. Analisis TTF pada aplikasi SIPD Penatausahaan Keuangan di Pemerintah Kota Bandung juga menunjukkan bahwa karakteristik tugas dan karakteristik teknologi memengaruhi TTF, kemudian TTF berpengaruh terhadap kinerja aparatur [7]. Hasil

penelitian tersebut memberikan penguatan empiris bahwa sistem yang sesuai dengan pola kerja dapat mempercepat penyelesaian pekerjaan, mengurangi pengulangan, dan meningkatkan ketepatan hasil. Dalam penelitian ini, koefisien TTF sebesar 0,45 yang paling besar di antara jalur langsung menunjukkan bahwa penyesuaian teknologi terhadap tugas merupakan titik intervensi yang paling strategis untuk meningkatkan kinerja penganggaran.

Peran TTF sebagai mediator penuh pada hubungan Kualitas Sistem dengan Kinerja Penganggaran Daerah memberikan makna bahwa kualitas teknis belum memiliki nilai kinerja apabila tidak diterjemahkan menjadi dukungan terhadap tugas. Sistem yang cepat dan stabil belum tentu meningkatkan kinerja apabila struktur menu tidak mengikuti siklus penganggaran, istilah yang digunakan tidak dipahami pengguna, atau otorisasi tidak sesuai pembagian kewenangan. Sebaliknya, sistem dengan fitur yang tidak berlebihan tetapi tepat sesuai kebutuhan dapat memberikan manfaat yang lebih nyata. Evaluasi perspektif pengguna terhadap SIPD di Kabupaten X menunjukkan bahwa aspek kualitas sistem informasi memperoleh penilaian paling rendah dan pengguna masih memerlukan bimbingan teknis yang lebih intensif, terutama ketika terjadi pembaruan sistem [21]. Temuan tersebut membantu menjelaskan jalur mediasi pada penelitian ini: kualitas sistem meningkatkan kinerja melalui pengalaman pengguna dalam menyelesaikan tugas. Karena itu, indikator keberhasilan pengembangan SIPD RI sebaiknya tidak berhenti pada waktu aktif sistem atau jumlah modul, tetapi juga mencakup waktu penyelesaian tugas, jumlah pengulangan input, tingkat kesalahan, kebutuhan aplikasi pendamping, dan kemudahan pengguna menelusuri sumber perubahan data.

Berbeda dengan kualitas sistem, Kualitas Informasi menunjukkan pengaruh langsung sekaligus tidak langsung terhadap kinerja. Informasi anggaran dapat langsung memengaruhi pekerjaan karena menjadi dasar analisis, penelaahan, dan pengendalian, bahkan ketika beberapa fungsi teknis sistem belum sepenuhnya sesuai. Pengguna masih dapat memanfaatkan informasi yang akurat untuk membuat keputusan, melakukan koordinasi, dan menyusun rekomendasi. Pada saat yang sama, informasi yang berkualitas meningkatkan TTF karena membuat sistem lebih relevan terhadap tugas. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan SIPD dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah [25]. Dalam konteks penganggaran, keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa informasi yang baik harus didukung oleh kemampuan pengguna memahami struktur data, memeriksa kewajaran, dan menginterpretasikan keluaran sistem. Dengan demikian, strategi perbaikan tidak cukup berupa peningkatan kualitas database, tetapi juga harus mencakup penguatan literasi data, pemahaman regulasi, dan kemampuan analitis pegawai agar informasi yang tersedia dapat dikonversi menjadi keputusan penganggaran yang tepat.

Konteks Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan dimensi tambahan dalam memahami hubungan antara sistem, informasi, TTF, dan kinerja. Karakteristik wilayah kepulauan dapat menimbulkan variasi kualitas konektivitas, pola koordinasi, dan kecepatan pertukaran informasi antarsatuan kerja. Dalam situasi demikian, sistem terpusat harus mampu menjaga akses yang konsisten dan memberikan prosedur kerja yang jelas ketika terjadi gangguan. Penelitian implementasi e-planning berbasis SIPD di Kabupaten Pakpak Bharat menunjukkan bahwa standardisasi nomenklatur dan dokumen dapat membantu proses perencanaan, tetapi implementasi kebijakan tetap menghadapi aspek teknis dan organisatoris [19]. Penelitian di Sulawesi Selatan juga mencatat manfaat standardisasi serta kemudahan monitoring, namun masih menemukan kendala pemeliharaan sistem dan jadwal input yang kurang fleksibel [28]. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa kualitas SIPD RI perlu mempertimbangkan variasi kapasitas daerah. Pada Bakeuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dukungan kanal bantuan, mekanisme eskalasi masalah, dokumentasi perubahan fitur, dan prosedur kontingensi menjadi bagian penting dari kesesuaian tugas-teknologi karena membantu menjaga kesinambungan proses penganggaran di tengah perbedaan kondisi operasional.

Aspek sumber daya manusia menjadi penghubung penting antara kualitas teknologi dan kinerja. Pengguna tidak hanya membutuhkan pelatihan cara mengoperasikan menu, tetapi juga pemahaman mengapa data tertentu harus diinput, bagaimana data digunakan pada tahapan berikutnya, dan apa konsekuensi kesalahan terhadap dokumen anggaran. Penelitian implementasi SIPD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara menegaskan pentingnya kemampuan pegawai dalam mendukung penerapan sistem [18]. Temuan pada Kota Denpasar juga menunjukkan bahwa efektivitas SIPD dapat terhambat oleh proses adaptasi, keterbatasan integrasi, kesalahan aplikasi, dan minimnya pelatihan serta sosialisasi [27]. Oleh karena itu, pelatihan yang disarankan bukan kegiatan satu kali, melainkan program berjenjang berdasarkan peran pengguna. Operator memerlukan latihan transaksi dan penanganan kesalahan, pejabat penelaah memerlukan kemampuan membaca indikator serta memvalidasi informasi, sedangkan manajemen memerlukan pemanfaatan dashboard dan laporan untuk

pengambilan keputusan. Pendekatan berbasis peran akan meningkatkan TTF karena materi pelatihan langsung dikaitkan dengan tugas aktual masing-masing pengguna.

Selain kompetensi, manajemen perubahan diperlukan karena implementasi SIPD RI mengubah kebiasaan kerja, alur koordinasi, dan pembagian tanggung jawab. Transisi dari aplikasi lama menuju sistem nasional dapat menimbulkan resistensi apabila pengguna merasa proses baru lebih panjang atau belum memahami manfaatnya. Penelitian mengenai kesiapan implementasi SIPD RI di Kabupaten Karanganyar menunjukkan bahwa kesiapan perlu dilihat melalui berbagai aspek organisasi, bukan hanya ketersediaan aplikasi [23]. Studi tantangan implementasi SIPD RI di Kotawaringin Timur juga menyoroti hambatan teknis dan operasional dalam penatausahaan keuangan [26]. Berdasarkan hal tersebut, Bakeuda dapat membentuk tim pengelola perubahan yang terdiri atas unsur teknis, penganggaran, akuntansi, dan perwakilan pengguna. Tim ini bertugas memetakan perubahan proses, mendokumentasikan masalah, menyampaikan pembaruan, dan menilai dampak perubahan sistem terhadap pekerjaan. Komunikasi yang teratur akan mengurangi ketidakpastian dan membantu pengguna memahami bahwa perubahan prosedur merupakan bagian dari integrasi tata kelola, bukan sekadar penambahan beban administratif.

Interoperabilitas juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan TTF dan kinerja penganggaran. Sistem penganggaran berhubungan dengan data perencanaan, pendapatan, aset, pengadaan, penatausahaan, dan pelaporan. Apabila pertukaran data antarmodul belum berjalan baik, pengguna harus menyalin atau menyesuaikan data secara manual sehingga risiko kesalahan meningkat. Kajian pengembangan SIPD dengan konsep Service Oriented Architecture menekankan pentingnya rancangan layanan yang mendukung integrasi sistem pemerintahan daerah [16]. Penerapan SIPD berbasis web pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor juga menggambarkan peran sistem informasi dalam mempermudah aktivitas pegawai dan menyediakan dukungan bagi pelaksanaan pekerjaan [17]. Bagi SIPD RI, interoperabilitas perlu dikembangkan melalui standar data, antarmuka pertukaran, sinkronisasi otomatis, serta pencatatan jejak perubahan. Penguatan ini akan meningkatkan kualitas informasi sekaligus mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk rekonsiliasi. Dalam konteks hasil penelitian, interoperabilitas dapat memperkuat pengaruh kualitas sistem terhadap TTF karena fungsi teknis sistem menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna yang harus bekerja lintas proses dan lintas unit.

Hasil penelitian juga memiliki implikasi bagi transparansi dan akuntabilitas penganggaran daerah. Sistem yang terintegrasi dapat menyediakan jejak audit, histori perubahan, identifikasi pengguna, dan keterkaitan antara dokumen perencanaan dengan realisasi. Namun, manfaat tersebut hanya tercapai apabila data dicatat secara konsisten dan fitur pengendalian digunakan sesuai prosedur. Implementasi SIPD RI pada proses akuntansi dan pelaporan di Kabupaten Karanganyar menunjukkan bahwa kesiapan organisasi menjadi prasyarat penting dalam perpindahan menuju sistem yang terintegrasi [23]. Sementara itu, kajian sistematis mengenai implementasi SIPD mengidentifikasi bahwa efektivitas telah terlihat pada proses perencanaan dan penganggaran, tetapi masih terdapat berbagai kendala yang berulang di daerah [24]. Dengan demikian, peningkatan akuntabilitas tidak hanya bergantung pada digitalisasi dokumen, melainkan pada kualitas kontrol, pembagian akses, validasi berjenjang, dan konsistensi penggunaan. Temuan penelitian ini memperjelas bahwa TTF merupakan mekanisme yang membuat fitur pengendalian tersebut benar-benar digunakan dalam pekerjaan, sehingga kualitas sistem dan informasi dapat menghasilkan dampak pada kinerja penganggaran.

Nilai R^2 sebesar 0,58 pada TTF dan 0,49 pada Kinerja Penganggaran Daerah menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan penjelasan sedang, sekaligus menandakan masih terdapat faktor lain di luar penelitian. Faktor tersebut dapat mencakup kualitas layanan, dukungan pimpinan, kompetensi digital, budaya organisasi, intensitas penggunaan, kesiapan infrastruktur, pengendalian internal, dan tekanan waktu penyusunan anggaran. Hasil evaluasi pengguna SIPD menunjukkan bahwa kualitas layanan, termasuk bimbingan teknis, menjadi aspek yang penting ketika sistem mengalami pembaruan [21]. Penelitian mengenai efektivitas SIPD di sejumlah daerah juga menunjukkan bahwa gangguan server, integrasi yang belum optimal, dan kebutuhan adaptasi dapat memengaruhi manfaat yang dirasakan [20], [24], [27]. Oleh karena itu, pengembangan model pada penelitian selanjutnya dapat memasukkan kualitas layanan dan kesiapan organisasi sebagai variabel yang memengaruhi TTF atau kinerja. Meskipun demikian, kemampuan penjelasan model saat ini sudah memberikan dasar yang cukup kuat untuk menempatkan kualitas sistem, kualitas informasi, dan TTF sebagai faktor utama dalam evaluasi implementasi SIPD RI pada domain penganggaran.

Dari sisi kebijakan, Kementerian Dalam Negeri dapat memanfaatkan temuan penelitian ini untuk mengembangkan indikator evaluasi SIPD RI yang lebih berorientasi pada manfaat pekerjaan. Evaluasi nasional sebaiknya mengukur stabilitas dan kecepatan sistem, tetapi juga menilai tingkat kesesuaian fitur dengan proses

bisnis, kualitas informasi, kemudahan penyelesaian tugas, frekuensi penggunaan aplikasi pendamping, serta kepuasan pengguna pada setiap tahap siklus keuangan. Kajian kualitas SIPD menggunakan ISO/IEC 25010 menunjukkan bahwa evaluasi terstruktur dapat membantu mengidentifikasi karakteristik produk yang perlu ditingkatkan [22]. Selain itu, studi implementasi dan efektivitas SIPD terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan sistem dapat memberikan dampak pada kualitas keluaran organisasi, meskipun hasil antarwilayah tidak selalu seragam [25]. Dengan evaluasi yang berorientasi pada tugas, perbaikan sistem dapat diprioritaskan berdasarkan masalah yang paling besar pengaruhnya terhadap kinerja. Umpan balik dari pemerintah daerah juga perlu dikelola dalam daftar pengembangan yang transparan sehingga pengguna mengetahui status usulan, perubahan versi, dan solusi sementara yang tersedia.

Pada tingkat Bakeuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hasil penelitian dapat diterjemahkan ke dalam program perbaikan yang terukur. Pertama, dilakukan pemetaan tugas dan fitur untuk mengidentifikasi proses yang telah sesuai, proses yang masih memerlukan pekerjaan manual, dan titik yang paling sering menimbulkan kesalahan. Kedua, disusun indikator kualitas data untuk mengukur kelengkapan, ketepatan waktu, konsistensi, dan jumlah koreksi. Ketiga, dibentuk forum pengguna SIPD RI yang secara berkala membahas masalah teknis dan substantif. Keempat, dikembangkan basis pengetahuan berisi panduan, kasus kesalahan, dan prosedur penyelesaian yang dapat diakses seluruh unit. Kelima, hasil monitoring digunakan untuk menentukan kebutuhan pelatihan serta prioritas koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Langkah tersebut sejalan dengan berbagai studi yang menekankan perlunya optimalisasi sistem, peningkatan kapasitas pengguna, dan perbaikan koordinasi untuk menghasilkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif [15], [20], [24], [26]. Dengan pendekatan ini, perbaikan kualitas sistem dan informasi diarahkan langsung pada penciptaan TTF, sehingga peluang peningkatan kinerja penganggaran menjadi lebih besar dan dapat diukur secara berkelanjutan.

Secara teoretis, hasil penelitian memperlihatkan bahwa integrasi model kesuksesan sistem informasi dan TTF mampu memberikan penjelasan yang lebih rinci dibandingkan pengujian pengaruh langsung semata. Model DeLone dan McLean menjelaskan bahwa kualitas sistem dan kualitas informasi merupakan dimensi penting keberhasilan sistem, sedangkan TTF menjelaskan proses ketika kemampuan teknologi sesuai dengan karakteristik tugas. Hasil mediasi penuh pada jalur Kualitas Sistem menunjukkan bahwa kualitas teknis perlu melewati mekanisme kesesuaian tugas sebelum menghasilkan kinerja. Sebaliknya, mediasi parsial pada Kualitas Informasi menunjukkan bahwa informasi dapat memberi manfaat langsung sekaligus meningkatkan kesesuaian teknologi. Pola ini memperluas temuan penelitian terdahulu yang menggunakan model keberhasilan sistem dan TTF secara terpisah maupun pada konteks pengguna yang berbeda [8], [9], [21]. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian bukan hanya membuktikan adanya pengaruh antarvariabel, tetapi juga menjelaskan mekanisme bagaimana SIPD RI menghasilkan nilai bagi penganggaran daerah. Penjelasan mekanisme tersebut penting karena memungkinkan rekomendasi yang lebih spesifik: kualitas sistem harus diterjemahkan ke dalam dukungan tugas, sedangkan kualitas informasi harus dijaga agar dapat digunakan langsung dalam keputusan dan proses kerja.

Pengukuran kinerja penganggaran setelah implementasi SIPD RI perlu dikembangkan dalam bentuk indikator operasional yang dapat diamati secara periodik. Indikator tersebut dapat meliputi ketepatan waktu penyelesaian tahapan anggaran, persentase usulan yang dikembalikan karena kesalahan data, jumlah koreksi setelah konsolidasi, durasi rekonsiliasi antarunit, tingkat penggunaan aplikasi pendamping, dan kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran. Indikator semacam ini akan memperlihatkan apakah peningkatan kualitas sistem dan informasi benar-benar mengurangi beban kerja serta memperbaiki keluaran proses. Penelitian mengenai efektivitas SIPD pada BPKAD Indragiri Hulu dan Kota Denpasar menunjukkan bahwa penilaian implementasi perlu memperhatikan manfaat aktual sekaligus hambatan yang dialami pengguna [15], [27]. Bagi Bakeuda, pengukuran dapat dilakukan sebelum dan sesudah pembaruan sistem atau pelatihan agar dampaknya dapat dibandingkan. Data evaluasi tersebut kemudian menjadi dasar dalam menentukan prioritas perbaikan, sehingga keputusan tidak hanya didasarkan pada keluhan individual, tetapi pada bukti mengenai tahapan kerja yang paling membutuhkan intervensi.

Keamanan dan keterlacakan data juga perlu ditempatkan sebagai bagian dari kualitas sistem yang mendukung TTF. Penganggaran daerah melibatkan data strategis, kewenangan berjenjang, dan perubahan dokumen yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Sistem yang sesuai dengan tugas perlu menyediakan pengaturan hak akses berdasarkan peran, autentikasi yang memadai, pencatatan aktivitas pengguna, histori perubahan, serta mekanisme persetujuan yang konsisten. Apabila pengguna tidak dapat menelusuri siapa yang mengubah data dan kapan perubahan dilakukan, proses verifikasi akan membutuhkan komunikasi tambahan dan mengurangi efisiensi. Penerapan SIPD RI dalam akuntansi dan pelaporan daerah menekankan pentingnya kesiapan proses serta integrasi informasi untuk mendukung akuntabilitas [23]. Oleh sebab itu, audit trail tidak seharusnya

dipandang sebagai fitur teknis tambahan, melainkan sebagai alat kerja yang membantu pegawai Bakeuda memeriksa perubahan, menyelesaikan perbedaan data, dan memastikan bahwa dokumen anggaran telah melewati tahapan otorisasi yang benar. Penguatan aspek ini dapat meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap informasi sekaligus memperkuat kesesuaian sistem dengan tugas pengendalian.

Koordinasi antarpengguna menjadi semakin penting karena kualitas informasi pada SIPD RI bersifat kolektif. Bakeuda dapat menghasilkan laporan yang akurat apabila perangkat daerah memasukkan data tepat waktu dan mengikuti standar yang sama. Dengan demikian, TTF tidak hanya terjadi pada tingkat individu, tetapi juga pada tingkat proses lintas organisasi. Ketika satu unit menunda input atau menggunakan interpretasi nomenklatur yang berbeda, manfaat sistem bagi unit lain ikut menurun. Studi implementasi SIPD dalam perencanaan anggaran di Kabupaten Ogan Komering Ulu dan proses perencanaan pembangunan di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa koordinasi, fleksibilitas jadwal, serta konsistensi proses merupakan bagian penting dari keberhasilan penerapan [20], [28]. Berdasarkan temuan tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu menetapkan kalender penginputan, titik pemeriksaan data, forum penyelesaian perbedaan, dan jalur eskalasi yang disepakati seluruh perangkat daerah. Tata kelola lintas unit tersebut akan membuat informasi mengalir sesuai kebutuhan tahapan penganggaran dan memperkuat pengaruh kualitas informasi terhadap kinerja.

Pada akhirnya, keberlanjutan manfaat SIPD RI membutuhkan siklus evaluasi dan pembelajaran organisasi. Sistem nasional akan terus mengalami perubahan mengikuti regulasi, kebutuhan pelaporan, dan pengembangan teknologi. Karena itu, kesesuaian tugas-teknologi yang tercapai pada satu periode belum tentu bertahan tanpa evaluasi berkala. Setiap pembaruan perlu diuji dari sudut pandang pengguna, didokumentasikan dampaknya terhadap alur kerja, serta diikuti penyesuaian panduan dan pelatihan. Evaluasi perspektif pengguna menunjukkan bahwa pembaruan sistem perlu disertai bimbingan teknis yang intensif [21], sedangkan kajian literatur implementasi SIPD menegaskan bahwa kendala teknis dan kapasitas pengguna masih berulang di banyak daerah [24]. Dengan membangun mekanisme pembelajaran yang berkelanjutan, Bakeuda dapat menjaga agar peningkatan kualitas sistem dan informasi selalu diikuti oleh peningkatan TTF. Pendekatan ini sekaligus memastikan bahwa SIPD RI berkembang sebagai infrastruktur tata kelola yang mendukung keputusan dan akuntabilitas, bukan hanya sebagai kewajiban administrasi digital.

Temuan penelitian juga menunjukkan perlunya membedakan antara keberhasilan penggunaan dan keberhasilan kinerja. Tingginya frekuensi akses atau kepatuhan menginput data belum otomatis menunjukkan bahwa sistem telah meningkatkan kualitas penganggaran. Sistem dapat digunakan karena bersifat wajib, tetapi pengguna masih melakukan pekerjaan tambahan di luar aplikasi untuk memastikan data benar. Oleh karena itu, evaluasi TTF perlu menanyakan apakah SIPD RI mengurangi langkah kerja, membantu penyelesaian tugas tepat waktu, menyediakan informasi pada tingkat rincian yang dibutuhkan, dan mempermudah koordinasi. Penilaian berbasis pengalaman tugas akan menghasilkan gambaran yang lebih akurat daripada sekadar mengukur intensitas penggunaan. Evaluasi pengguna SIPD di Kabupaten X memperlihatkan bahwa penerimaan pengguna dan kualitas sistem masih memerlukan penguatan, terutama melalui perbaikan dan bimbingan teknis [21]. Dalam konteks penelitian ini, penekanan tersebut penting agar pengaruh positif TTF terhadap kinerja tidak dimaknai hanya sebagai penggunaan sistem, melainkan sebagai penggunaan yang benar-benar menghasilkan perbaikan proses dan keluaran penganggaran.

Kualitas informasi perlu pula dievaluasi dari kemampuan sistem menyajikan informasi pada waktu yang tepat untuk berbagai tingkatan keputusan. Operator membutuhkan detail transaksi dan validasi, kepala bidang membutuhkan ringkasan deviasi serta status penyelesaian, sedangkan pimpinan memerlukan indikator strategis untuk menentukan tindakan. Apabila sistem hanya menyediakan data mentah atau laporan yang tidak mudah ditelusuri, pengguna akan mengeksport data dan mengolahnya kembali, sehingga potensi manfaat integrasi berkurang. Studi mengenai transparansi APBD menempatkan SIPD sebagai bagian dari mekanisme yang mendukung akses informasi dan akuntabilitas [14], sementara penelitian kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa penerapan sistem dan kompetensi pengguna perlu berjalan bersama [25]. Karena itu, pengembangan SIPD RI perlu memperhatikan desain informasi berbasis peran, kemampuan drill-down dari ringkasan ke detail, serta penyajian peringatan ketika terdapat data tidak lengkap atau tidak konsisten. Fitur tersebut akan meningkatkan relevansi informasi dan memperkuat hubungan langsung Kualitas Informasi dengan Kinerja Penganggaran Daerah.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa transformasi digital penganggaran daerah merupakan perubahan sosio-teknis. Teknologi, pengguna, aturan, data, dan proses organisasi saling memengaruhi. Perbaikan satu unsur tanpa penyesuaian unsur lain dapat menghasilkan manfaat yang terbatas. Kualitas sistem

perlu disertai kapasitas infrastruktur dan dukungan pengguna; kualitas informasi membutuhkan tata kelola data dan validasi; sedangkan TTF membutuhkan pemetaan proses bisnis serta evaluasi berkelanjutan. Berbagai penelitian implementasi SIPD di daerah memperlihatkan pola yang serupa, yaitu manfaat integrasi dan standarisasi berjalan beriringan dengan tantangan teknis, adaptasi, koordinasi, serta kompetensi aparatur [20], [23], [24], [26]–[28]. Hasil penelitian di Bakeuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperkuat bukti tersebut melalui model kuantitatif yang menjelaskan jalur pengaruh dan peran mediasi. Dengan demikian, strategi penguatan SIPD RI harus diarahkan pada penciptaan ekosistem kerja yang membuat teknologi benar-benar sesuai dengan tugas penganggaran dan mampu menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk keputusan, pengendalian, dan pertanggungjawaban.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Kualitas Sistem SIPD RI terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Task-Technology Fit* (TTF) pegawai Bakeuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang menunjukkan bahwa semakin andal, responsif, dan mudah digunakan SIPD RI, semakin tinggi pula tingkat kesesuaian sistem tersebut dengan kebutuhan tugas penganggaran pengguna. Kedua, Kualitas Informasi yang dihasilkan SIPD RI juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap TTF, yang menegaskan pentingnya akurasi, kemutakhiran, dan relevansi data sebagai prasyarat kesesuaian tugas-teknologi. Ketiga, TTF terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Penganggaran Daerah, dengan besaran pengaruh yang paling dominan di antara seluruh hubungan langsung dalam model, sehingga mengonfirmasi bahwa kesesuaian antara karakteristik SIPD RI dan kebutuhan tugas pengguna merupakan prasyarat utama tercapainya kinerja penganggaran yang optimal. Keempat, Kualitas Sistem tidak terbukti berpengaruh signifikan secara langsung terhadap Kinerja Penganggaran Daerah, namun berpengaruh signifikan secara tidak langsung melalui TTF, yang menunjukkan bahwa TTF berperan sebagai mediator penuh (*full mediation*) pada jalur ini perbaikan kualitas sistem semata tidak akan meningkatkan kinerja penganggaran apabila tidak diikuti oleh kesesuaian sistem dengan kebutuhan tugas pengguna. Kelima, Kualitas Informasi terbukti berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Penganggaran Daerah baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui TTF, yang menunjukkan peran mediasi parsial (*partial mediation*) TTF pada jalur ini. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kinerja penganggaran daerah melalui implementasi SIPD RI tidak dapat mengandalkan perbaikan kualitas sistem dan kualitas informasi semata, melainkan sangat bergantung pada terciptanya kesesuaian antara karakteristik teknologi SIPD RI dan kebutuhan tugas penganggaran pegawai Bakeuda, sebagaimana dijelaskan oleh teori *Task-Technology Fit* [7] dan model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean [6]. Temuan ini sekaligus menjawab *research gap* yang diajukan pada latar belakang penelitian, yaitu masih terbatasnya kajian yang memosisikan TTF sebagai variabel intervening dalam konteks pengelolaan keuangan daerah berbasis SIPD RI [8]–[11], serta membantu menjelaskan inkonsistensi temuan pada penelitian-penelitian terdahulu mengenai hubungan kualitas sistem/informasi dengan keberhasilan penggunaan sistem [10]. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat relevansi integrasi model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean [6] dengan model *Task-Technology Fit* Goodhue dan Thompson [7] dalam konteks sistem informasi pemerintahan daerah, khususnya pada domain penganggaran, serta memperkaya literatur mengenai peran TTF sebagai variabel intervening yang selama ini masih jarang diuji secara eksplisit dalam penelitian sistem informasi sektor publik di Indonesia. Secara praktis, bagi Bakeuda dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hasil penelitian ini menjadi dasar untuk tidak hanya berfokus pada perbaikan teknis SIPD RI (kestabilan server, kecepatan akses, akurasi data), tetapi juga memastikan kesesuaian sistem dengan alur kerja penganggaran melalui pelatihan berbasis tugas, penyesuaian fitur, dan mekanisme umpan balik pengguna secara berkala. Bagi Kementerian Dalam Negeri selaku pengelola SIPD RI secara nasional, temuan ini dapat menjadi masukan bahwa keberhasilan implementasi sistem di daerah perlu diukur tidak hanya dari sisi kualitas teknis sistem, tetapi juga dari sisi kesesuaiannya dengan karakteristik tugas pengguna di masing-masing daerah, termasuk daerah kepulauan dengan karakteristik geografis dan sumber daya yang berbeda dari daerah lain. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasilnya. Pertama, penelitian ini bersifat *cross-sectional* sehingga hanya menggambarkan kondisi pada satu titik waktu tertentu dan tidak dapat menangkap dinamika perubahan persepsi pengguna terhadap SIPD RI dari waktu ke waktu, terutama mengingat sistem ini masih terus mengalami penyempurnaan. Kedua, penelitian ini terbatas pada pegawai Bakeuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga hasilnya belum tentu dapat digeneralisasikan pada pemerintah daerah lain dengan karakteristik geografis, struktur organisasi, atau tingkat kematangan digital yang berbeda. Ketiga, data penelitian dikumpulkan melalui kuesioner berbasis persepsi (*self-reported data*), yang berpotensi menimbulkan bias subjektivitas responden dalam menilai kualitas sistem, kualitas informasi, TTF, maupun kinerja penganggaran daerah mereka sendiri. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian ke beberapa pemerintah daerah lain agar hasil penelitian dapat

digeneralisasikan secara lebih luas, mempertimbangkan desain penelitian longitudinal untuk menangkap perubahan persepsi pengguna seiring dengan penyempurnaan SIPD RI dari waktu ke waktu, serta menambahkan variabel lain yang relevan, seperti kualitas layanan (*service quality*), kesiapan organisasi, atau budaya digital pemerintah daerah, untuk memperkaya model penelitian mengenai keberhasilan implementasi sistem informasi pemerintahan daerah. Bagi Bakeuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kementerian Dalam Negeri, disarankan untuk terus melakukan evaluasi berkala terhadap kesesuaian tugas-teknologi SIPD RI, tidak hanya pada aspek teknis sistem, guna memastikan bahwa investasi digitalisasi pengelolaan keuangan daerah benar-benar berdampak pada peningkatan kinerja penganggaran daerah secara berkelanjutan.

Referensi

- [1] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, 2014.
- [2] Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*, 2019.
- [3] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*, 2019.
- [4] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*, 2020.
- [5] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, 2022.
- [6] W. H. DeLone and E. R. McLean, "The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update," *Journal of Management Information Systems*, vol. 19, no. 4, pp. 9–30, 2003.
- [7] D. L. Goodhue and R. L. Thompson, "Task-technology fit and individual performance," *MIS Quarterly*, vol. 19, no. 2, pp. 213–236, 1995.
- [8] I. B. G. A. Permana and D. P. Setianto, "Pengaruh task technology fit, system quality dan information quality terhadap user performance: Perceived usefulness dan perceived ease of use sebagai pemediasi," *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*, vol. 10, no. 3, p. 231, 2017.
- [9] D. Kardha *et al.*, "Evaluasi kinerja dan analisa sistem informasi akademik menggunakan model task-technology fit," *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, vol. 10, no. 2, pp. 626–637, 2023.
- [10] T. Febrianti and Fachroh, "Pengaruh kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan dan perceived benefits terhadap kepuasan pengguna aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Bengkalis," *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Keuangan Publik*, Politeknik Negeri Bengkalis.
- [11] R. Agustina, R. A. Afriana, and R. Gustiana, "Pengaruh kualitas sistem dan kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) penganggaran pada puskesmas di Kabupaten Barito Kuala," 2024.
- [12] A. H. Tumija, Hendra, and M. Sinurat, "Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah," *Jurnal Media Birokrasi*, 2023.
- [13] J. F. Hair, G. T. M. Hult, C. M. Ringle, and M. Sarstedt, *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*, 3rd ed. Thousand Oaks, CA, USA: Sage Publications, 2022.
- [14] I. G. A. Y. Kartika and A. A. N. E. S. Gorda, "Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Era Pandemi Covid-19: Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah," *E-Jurnal Akuntansi*, vol. 32, no. 1, pp. 62–75, 2022, doi: 10.24843/EJA.2022.v32.i01.p05.
- [15] C. A. Adisi and A. Sadad, "Efektivitas Program Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Kantor BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu," *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, vol. 1, no. 3, pp. 150–164, 2022, doi: 10.55606/jhps.v1i2.581.
- [16] R. P. I. Putri and M. Kamisutara, "Perencanaan Pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan Konsep Service Oriented Architecture (SOA)," *Jurnal Ilmu Komputer dan Bisnis*, vol. 13, no. 1, 2022, doi: 10.47927/jikb.v13i1.295.
- [17] M. Z. Zumar, L. Hidayat, and D. H. Fahsani, "Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Web di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor," *Jurnal Informatika Kesatuan*, vol. 2, no. 2, pp. 229–238, 2022.
- [18] D. Alfani and J. Nasution, "Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol. 6, no. 1, pp. 4036–4043, 2022, doi: 10.31004/jptam.v6i1.3496.
- [19] S. L. Lumbantobing, H. Kusmanto, and B. Ginting, "Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Penerapan E-Planning dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat," *PERSPEKTIF*, vol. 11, no. 4, pp. 1546–1558, 2022, doi: 10.31289/perspektif.v11i4.7227.
- [20] Tumija and P. A. Erlambang, "Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Anggaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan," *Jurnal Media Birokrasi*, vol. 5, no. 2, 2023, doi: 10.33701/jmb.v5i2.3696.
- [21] I. Subroto and B. A. A. Uliansyah, "Evaluasi Perspektif Pengguna Terhadap Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten X)," *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, vol. 7, no. 2, pp. 140–157, 2023, doi: 10.31092/jmkp.v7i2.2578.
- [22] Z. Setiawan, L. N. Amali, and M. Polin, "Analisis Evaluasi Kualitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Menggunakan ISO/IEC 25010 di BAPPEDA Provinsi Gorontalo," *Diffusion: Journal of Systems and Information Technology*, vol. 3, no. 1, 2023, doi: 10.37031/diffusion.v3i1.18310.
- [23] R. N. Arif and A. Firmansyah, "Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah RI (SIPD RI) dalam Proses Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar," *Akuntansiku*, vol. 3, no. 1, pp. 15–29, 2024, doi: 10.54957/akuntansiku.v3i1.630.
- [24] A. Maulani, M. I. Anshori, and N. Andriani, "Inovasi Teknologi dalam Pemerintahan: Implementasi SIPD sebagai Alat untuk Mendukung Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah," *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, vol. 7, no. 2, pp. 1415–1422, 2024, doi: 10.54371/jiip.v7i2.3451.
- [25] D. Fitriasari, "Pengaruh Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah," *Jurnal Bina Akuntansi*, vol. 11, no. 2, pp. 34–54, 2024, doi: 10.52859/jba.v11i2.649.

- [26] F. Triwahyuni and Y. Fatmawati, "Analisis Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) untuk Penatausahaan Keuangan di Kabupaten Kotawaringin Timur," *Nusantara Hasana Journal*, vol. 4, no. 5, pp. 58–71, 2024, doi: 10.59003/nhj.v4i5.1249.
- [27] I. K. A. Teken and A. Romarina, "Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Denpasar," *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, vol. 4, no. 2, 2024, doi: 10.33701/jtpm.v4i2.4419.
- [28] A. J. Syarifuddin, A. Rahim, and S. Astuty, "Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah: Studi Kasus pada Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan," *Scientica: Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi*, vol. 2, no. 11, pp. 270–282, 2024.